

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Pesisir Selatan, Sistem keamanan pemerintah berbasis elektronik sangat penting dalam menjaga integritas dan kerahasiaan data. perlunya implementasi enkripsi yang kuat untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Selain itu, pemantauan aktif terhadap ancaman siber dan deteksi dini menjadi kunci dalam merespon potensi serangan. Penyediaan pelatihan keamanan bagi personel pemerintah juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko serangan siber.
2. Kendala - kendala yang dihadapi oleh penyelenggara keamanan spbe pesisir Selatan dalam Implementasi Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Di Kabupaten Pesisir Selatan. Kendala yang terjadi dalam keamanan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan seperti
 - a. Kerentanan website,
 - b. Serangan mengacak-acak website
 - c. Kerentanan pemindaian,
 - d. Kerentanan jaringan,
 - e. Kerentanan sistem

3. Upaya – upaya yang dilakukan oleh penyelenggara SPBE terkait kendala yang dihadapi dalam Implementasi Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Di Kabupaten Pesisir Selatan Dalam menghadapi kendala keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik.

a. *Fire Wall*

Sistem deteksi ancaman untuk mengidentifikasi dan merespons serangan siber. pembaruan rutin perangkat lunak dan sistem operasi untuk mengatasi celah keamanan yang dapat ditindaki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

b. Melakukan Pelatihan-Pelatihan Personel

Pemerintah juga berfokus pada pelatihan personel untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan mengurangi risiko insiden yang disebabkan oleh kelalaian manusia.

c. Kerja sama pemerintah dengan sektor swasta

Pemerintah terus berinvestasi dalam riset keamanan siber melakukan kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dan peningkatan regulasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang sudah di sampaikan dalam Implementasi Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Di Kabupaten Pesisir Selatan maka dapat disarankan:

- a. Agar Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dan sektor swasta dalam pertukaran informasi pemerintah dapat memperkuat keamanan, dan meningkatkan kolaborasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman serangan siber.
- b. Agar Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk pemantauan keamanan secara rutin sangat penting. Sistem pemerintah harus dilengkapi dengan perangkat lunak dan Infrastruktur yang memadai dalam pemantauan yang canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan respons cepat terhadap ancaman serangan siber yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pemerintah Daerah*, PT. Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Ismail Nurdin, 2018, *Etika Pemerintah*, PT. Lintang Rasi Aksara Books, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Ilham, 2021, *E-Government*, PT. CV Budi Utama, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Muhammad Yusuf, 2023, *E-Government*, PT Nusa Creative, Cetakan 1, Media Nusa Creative.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya.
- Rendy Adiwilaga, 2018, *Sistem Pemerintah Indonesia*, PT. CV Budi Utama, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

B. UNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

C. SUMBER LAIN

- Acham Fauzi, 2019, Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 1.
- Adelina Ibrahim, 2020, Keamanan Untuk Penerapan Layanan Publik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe), *Indonesian Journal on Information System*, Vol. 5, No 2.
- Abdul Raufalauddin Said, 2019, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 4, hlm. 13.
- Assaf Arief, 2021, Kajian Literatur Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, Vol. 8. No. 1.
- Brian Amy Prastyo, 2019, Pengaturan Tata Kelola Big Data Untuk Sinkronisasi Penerapan Satu Data Indonesia Dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *Jurnal S.L.R*, Vol. 5, No. 3.
- Faiz Rahman, 2021, Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1.
- Fajar Sidiq Tazkiyyah, 2020, Perancangan Manajemen Risiko Operasional SPBE, *e-Proceeding of Engineering*, Vol. 7, No. 2.
- Irfan Darmawan, 2020, Perancangan Tata Kelola Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menggunakan Standar, *e-Proceeding of Engineering*, Vol.6, No.2.
- Juliharta, 2023, *Evaluasi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2.
- Hemy Dwi Pratiwi, Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, 2020, Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 4, No. 11.
- Iswandari, Bunga Asoka, 2022, Jaminan Keamanan Data Pribadi Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government), *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 6.
- Muhammad Yunus Abbas, 2021, Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, Volume 8. No 1.

Nabila Septia Warman, 2022, Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraansistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Volume1, No.2.

Rahadian Bisma, 2022, Manajemen Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balik Papan, *Journal Information Engineering and Educational Technology*, Vol. 6, No. 2

Topan Nurdiansyah, 2020, Nalisis Dan Penerapan Manajemen Risiko Aplikasi Pemantauan Serta Sistem Manajemen, Keamanan Informasi, *Jurnal Pascaunla*, Vol. 10, No. 5.

Wawancara dengan Bapak Syafrudin selaku Kepala Bidang Aplikasi Informasi pada hari Jumat/29 Desember 2023, pukul 10:00 WIB.